

RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
TOBA
TAHUN 2025-2029



2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan karuniaNya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Toba selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Dokumen ini mengacu pada telaah Visi Misi Kabupaten Toba yakni **Toba Mantap 2029: “Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya”** serta selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah, secara khusus berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029. Renstra ini memuat garis besar tujuan, sasaran dan strategi sekaligus memberikan gambaran tentang kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif dalam lima tahun, yang diharapkan mampu menjawab permasalahan pembangunan di Kabupaten Toba.

Dengan disusunnya Renstra ini, selanjutnya seluruh pelaksanaan program/kegiatan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba harus mengacu kepada dokumen dimaksud, dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi tugas dan fungsi perangkat daerah.

Demikian Renstra ini disusun, dengan harapan dapat menjadi acuan kerja yang efektif dan berkontribusi nyata dalam pembangunan demi memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Toba.

Balige, 19 September 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA**



AUGUS SITORUS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PEMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TOBA	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Setda Kabupaten Toba.	10
2.1.1. Sekretaris Daerah	11
2.2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.....	15
2.3. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.....	15
2.3.1. Sumber Daya Manusia	15
2.3.2. Sarana dan Prasarana.....	19
2.4. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.....	24
2.5. Kelompok Sasaran Layanan	27
2.6. Kerja Sama Perangkat Daerah dengan Mitra dalam Pemberian Pelayanan	28
2.7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.....	28
2.8. Penentuan Isu-isu Strategis	29
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Setda Kabupaten Toba	31
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	32
3.3. Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	36
3.4. Lokus.....	42

**BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan	44
4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda Kabupaten.....	70
4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah	72
4.4. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sekretariat Daerah.....	74

BAB V. PENUTUP76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan acuan dalam penyusunan anggaran perangkat daerah serta menjadi instrumen untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yang merupakan konsekuensi Pemilihan Kepala Daerah serentak.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 201 ayat (8) disebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Adapun ketentuan ini ditujukan untuk memfasilitasi proses demokrasi antara pemilihan di tingkat pusat dan daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan demikian, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba dilaksanakan

pada periode tahun 2025-2029, sehingga penyusunan Renja Setdakab Toba Tahun 2025 masih mempedomani Renstra Setdakab Toba Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, untuk penyusunan Renstra Setdakab Toba Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029.

Renstra merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap perangkat daerah dalam menjawab tuntutan lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggungjawab yang diembannya. Renstra memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman perangkat daerah dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki.

Renstra menjadi kunci penjabaran kebijakan melalui penetapan rencana prioritas disertai dengan target yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan realisasinya, sehingga pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dievaluasi pencapaiannya secara terukur.

Perencanaan strategis diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan tujuan organisasi dan langkah yang ditempuh dalam upaya mencapainya. Hal ini mendeskripsikan secara jelas tindakan dan pemikiran strategis, memfokuskan perhatian pada isu-isu penting dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Dengan demikian, perencanaan strategis turut memformulasikan dan mengkomunikasikan dengan jelas strategi yang hendak dilaksanakan, disertai proyeksi-proyeksi masa depan atas keputusan yang dibuat saat ini.

Secara garis besar, penyusunan Renstra dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan penyusunan Rancangan Awal Renstra dilakukan dengan kegiatan pembentukan Tim Penyusun

Renstra, orientasi mengenai Renstra meliputi analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Ranwal RPJMD, perumusan strategis dan arah kebijakan perangkat daerah, perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, penyusunan agenda kerja tim Renstra serta pengumpulan bahan data dan informasi terkait evaluasi Renstra sebelumnya;

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Penyusunan Rancangan Awal Renstra harus mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan sasaran dan indikator serta target dalam Rancangan Awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran kegiatan berdasarkan strategi dan kebijakan perangkat daerah;
3. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Toba telah memuat amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah sehingga direncanakan terdapat penambahan 1 (satu)

Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toba yakni Indeks Reformasi Hukum;

4. Tahapan penyusunan Rancangan Renstra merupakan penyempurnaan dari Rancangan Awal Renstra yang dibahas dan disepakati dalam Forum Perangkat Daerah dan dirumuskan dengan berita acara. Penyajian Renstra disajikan dengan sistematika yang sama dengan rancangan awal; Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah dengan menghadirkan *stakeholders* dan berkoordinasi dengan Bappelitbangda; Kemudian, rancangan Renstra perangkat daerah disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi dan dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD;
5. Tahapan Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah dan kebijakan serta program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
6. Tahapan Penetapan Renstra, dalam hal ini Rancangan Akhir Renstra disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan. Selanjutnya, Rancangan Akhir Renstra yang sudah disempurnakan tersebut diajukan untuk ditetapkan Kepala Daerah.

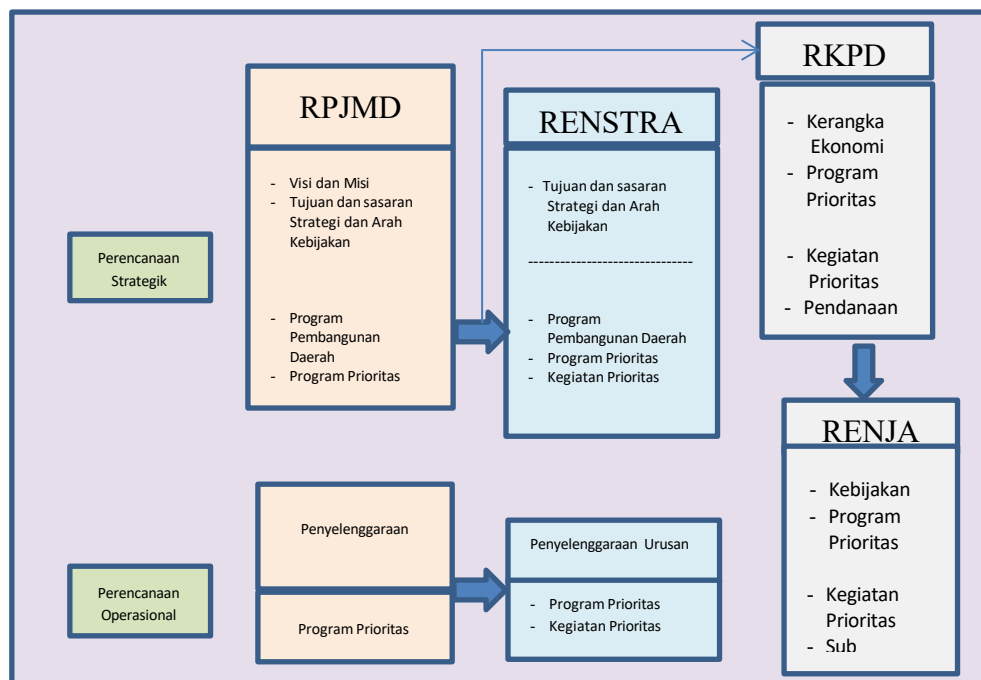
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, maka

Kabupaten Toba telah membentuk Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Toba melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba dan petunjuk pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Toba.

Dalam kaitan di atas, Renstra Sekretariat Daerah sebagai bagian dokumen perencanaan daerah dan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah lebih optimal, diperlukan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029.

Untuk lebih terperinci, secara operasional dokumen Renstra Sekretariat Daerah selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan selama masa periode Renstra bersangkutan.

Adapun keterhubungan Renstra Sekretariat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Toba dan Renja Sekretariat Daerah dapat diilustrasikan sebagai berikut:



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dimaksudkan:

1. Sinergitas Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Toba dengan Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
2. Sebagai pedoman perencanaan kinerja jangka menengah bagi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;

3. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Toba dengan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Toba, sehingga terdapat sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Toba;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba dalam menentukan prioritas sasaran, program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Toba, sehingga menjadi terarah dalam pencapaian hasil kinerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan berorientasi kepada hasil (*outcome*);
3. Sebagai pemacu peningkatan produktivitas kinerja serta sebagai alat ukur akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah;
4. Memudahkan pencapaian tujuan pada masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba dengan penyusunan program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program serta kegiatan operasional tahunan untuk rentang waktu 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, terdiri atas:

BAB I. PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TOBA.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Toba
- 2.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
- 2.3 Sumber Daya Setda Kabupaten Toba
- 2.4 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Setda Kabupaten Toba
- 2.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

- 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Toba
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
- 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda Kabupaten Toba
- 4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Setda Kabupaten Toba
- 4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Setda Kabupaten Toba

BAB V. PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TOBA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Toba

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Sekretariat Daerah Kabupaten Toba dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir serta petunjuk pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Toba.

Berdasarkan Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Toba maka Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, sedangkan fungsinya adalah:

- a. Memimpin dan mengoordinasikan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas para Asisten Sekretaris Daerah;
- c. Mengoordinasikan penyusunan APBD;
- d. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah;

- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan pembinaan administrasi ASN; dan
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Toba, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba mempunyai tugas dan fungsi dengan rincian sebagai berikut:

2.1.1. Sekretaris Daerah

Rincian tugas Sekretaris Daerah adalah memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah.

Adapun tugas tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Tugas Substantif dan Tugas Atributif:

1. Tugas Substantif adalah menetapkan kebijakan operasional Sekretariat Daerah dan/atau mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah.
2. Tugas Atributif adalah menetapkan perencanaan program kerja, menetapkan kebijakan operasional Sekretariat Daerah, mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para asisten dan

perangkat daerah, memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, merangkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretaris Daerah dibantu oleh:

A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:

1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:

- a) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Administrasi Kewilayahan;
- c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kerjasama;
- d) Jabatan Fungsional; dan
- e) Jabatan Pelaksana.

2. Bagian Hukum, membawahi:

- a) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perundang-undangan;
- b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Bantuan Hukum;
- c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Dokumentasi dan Informasi;
- d) Jabatan Fungsional; dan
- e) Jabatan Pelaksana.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- a) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Bina Mental Spritual;
- b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kesejahteraan Sosial;
- c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kesejahteraan Masyarakat;

- d) Jabatan Fungsional; dan
- e) Jabatan Pelaksana.

B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:

- a) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembinaan BUMD/BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
- b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
- c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Sumber Daya Alam;
- d) Jabatan Fungsional; dan
- e) Jabatan Pelaksana.

2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:

- a) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Penyusunan Program;
- b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengendalian Program;
- c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Evaluasi dan Pelaporan;
- d) Jabatan Fungsional; dan
- e) Jabatan Pelaksana.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:

- a) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- d) Jabatan Fungsional; dan
- e) Jabatan Pelaksana.

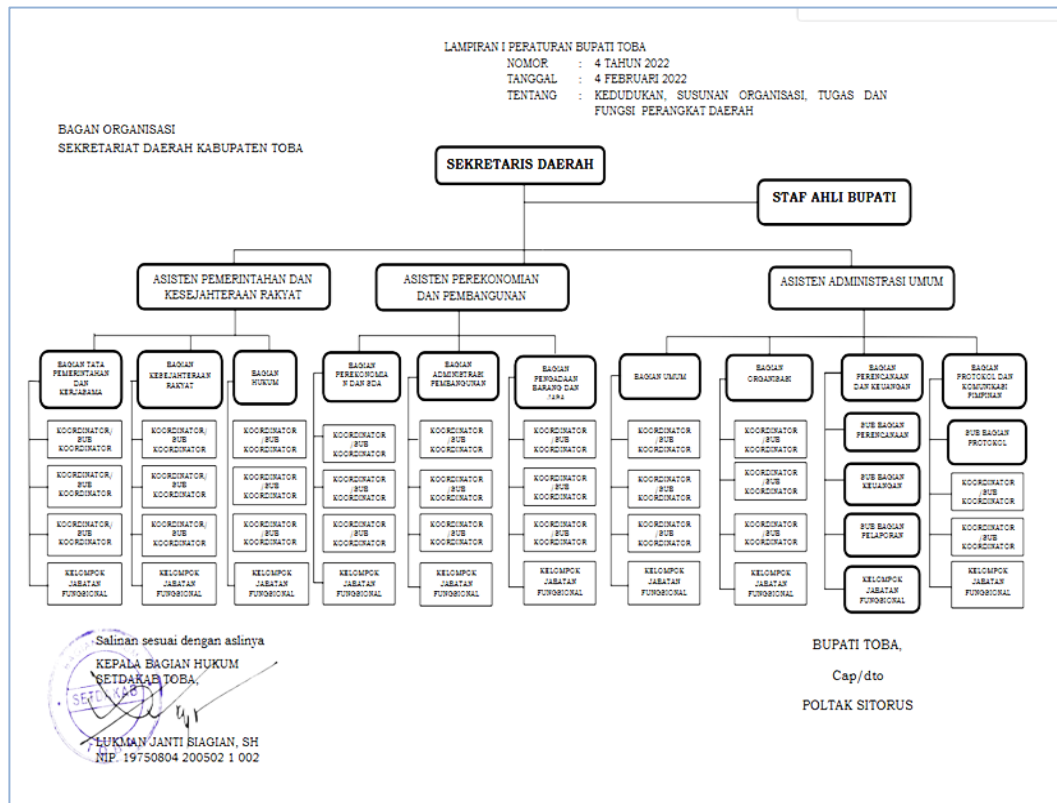
C. Asisten Administrasi Umum, membawahi:

1. Bagian Umum membawahi:

- a) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;

- b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perlengkapan;
 - c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Rumah Tangga;
 - d) Jabatan Fungsional; dan
 - e) Jabatan Pelaksana.
2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
- a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Komunikasi Pimpinan;
 - c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Dokumentasi Pimpinan;
 - d) Jabatan Fungsional; dan
 - e) Jabatan Pelaksana.
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:
- a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Pelaporan;
 - d) Jabatan Fungsional; dan
 - e) Jabatan Pelaksana.
4. Bagian Organisasi, membawahi:
- a) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pelayanan Publik dan Tatalaksana;
 - c) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - d) Jabatan Fungsional; dan
 - e) Jabatan Pelaksana.

2.2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Toba



2.3. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Toba

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam organisasi maupun pada proses manajemen, merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. SDM dengan kualifikasi baik akan mendorong perwujudan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam konteks perencanaan strategis, eksistensi SDM baik secara individual maupun manajemen SDM yang diterapkan akan berpengaruh terhadap organisasi, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.

Adapun SDM berkualitas akan mengurangi besaran struktur organisasi yang diterapkan, begitupun halnya dengan pola

manajemen SDM yang profesional, dimulai proses rekrutmen/pengadaan pegawai, pengembangan pegawai sampai dengan berakhirnya masa tugas/pensiun akan berpengaruh terhadap performa organisasi yang ada.

Besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah, selain berimplikasi pada bobot beban kerja yang diemban oleh kelembagaan pemerintah daerah tersebut, juga berdampak pada alokasi kebutuhan sumber daya manusia dan sistem manajemen yang diterapkan. Sehingga, untuk melaksanakan perencanaan strategis, ketersediaan SDM dan sistem manajemen harus diperhatikan kaitannya dengan kesiapan daerah dalam melaksanakan berbagai kewenangan yang dimilikinya.

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Toba memiliki ketersediaan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara keadaan Agustus 2025 sebanyak 130 orang, terdiri dari PNS laki-laki 61 orang, PNS perempuan 39 orang, PPPK laki-laki 12 orang, dan PPPK perempuan 18 orang. Adapun rincian jumlah ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Toba diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, golongan/ruang, pendidikan, jenjang jabatan dan kelompok usia, adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin:

Tabel 2.3.1.a

Jenis Kelamin		Jumlah
PNS	Laki-laki	61
	Perempuan	39
PPPK	Laki-laki	12
	Perempuan	18
Jumlah		130

2. Berdasarkan Golongan/Ruang:

Tabel 2.3.1.b

Jenis ASN	Golongan/Ruang	Jumlah
PNS	II.a	2
	II.b	0
	II.c	2
	II.d	2
	III.a	29
	III.b	14
	III.c	20
	III.d	14
	IV.a	6
	IV.b	5
	IV.c	6
Jumlah		100
PPPK	IX	14
	VII	2
	V	13
	III	1
Jumlah		30

3. Berdasarkan Pendidikan:

Tabel 2.3.1.c

Jenis ASN	Pendidikan	Jumlah
PNS	SD	0
	SLTP	0
	SLTA	9
	D1	0
	DII	0
	DIII	7
	DIV	4
	S1	71
	S2	9
	S3	0
Jumlah		100

Jenis ASN	Pendidikan	Jumlah
PPPK	SD	0
	SLTP	1
	SLTA	13
	D1	0
	DII	0
	DIII	2
	DIV	0
	S1	14
	S2	0
	S3	0
Jumlah		30

4. Berdasarkan Jenjang Jabatan:

a. Jabatan Struktural

Tabel 2.3.1.d

Jenis ASN	Eselon	Jenjang Jabatan	Jumlah
PNS	II.a	Sekda	1
	II.b	Asisten Sekda	3
	II.b	Staff Ahli Bupati	2
	III.a	Kabag	10
	IV.a	Kasubbag	4
Jumlah			19

b. Jabatan Non Struktural/Pejabat Fungsional:

Tabel 2.3.1.e

No	Tenaga Fungsional Tertentu	Jumlah
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	11
2.	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Muda	6
3.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	1
4.	Analisis Hukum Ahli Muda	1
5.	Penyuluh Hukum Ahli Muda	1
6.	Analisis Keuangan Pusat Daerah Ahli Muda	1
7.	Pranata Humas Ahli Muda	1
Jumlah		22

5. Berdasarkan Kelompok Usia:

Tabel 2.3.1.f

Jenis ASN	Jenis Jabatan	Eselon	≤25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-57	58	59-60	Jumlah
PNS		II.a							1				1
		II.b						1	2	2			5
		III.a				1	3	2	4				10
		IV.a			3	1							4
	Fungsional	-				4	7	8	3				22
	Pelaksana	-	5	10	10	13	10	7	2	1			58
	Jumlah		5	10	13	19	20	18	12	3	0		100

Jenis ASN	Jenis Jabatan	Esel on	≤25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-57	58	59-60	Jumlah
PPPK		II.a											
		II.b											
		III.a											
		IV.a											
	Fungsional	-											
	Pelaksana	-		4	5	8	9	2	2				30
	Jumlah		0	4	5	8	9	2	2	0	0		30

2.3.2. Sarana dan Prasarana

Saat ini, sarana dan prasarana kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Toba telah tersedia dan cukup memadai, namun masih perlu peningkatan akses dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi menuju sistem digitalisasi birokrasi. Adapun ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Toba berupa Aset/Barang Milik Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- Aset Tetap, sebesar Rp. 84.041.991.251,71

Tabel 2.3.2.a

Tanah	21.688.133.920,00
Peralatan dan Mesin	47.771.229.841,71
Gedung dan Kantor	13.489.618.190,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	786.943.300,00
Asset Tetap Lainnya	306.066.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
Jumlah Aset Tetap	84.041.991.251,71

b. Aset Lainnya, sebesar Rp. 2.001.687.696,00

Tabel 2.3.2.b

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00
Aset Lain-lain	2.001.687.696,00
Jumlah Aset Lainnya	2.001.687.696,00

c. Peralatan dan Mesin

Tabel 2.3.2.c

Alat Besar	13	1.183.695.700,00
1. Portable Generating Set	3	504.417.700,00
2. Stationary Generating Set	2	529.378.000,00
3. Pompa Air	8	149.900.000,00
Komputer	350	4.105.256.241,00
1. Mini Komputer	2	11.500.000,00
2. P.C Unit	62	897.799.500,00
3. Lap Top	42	523.672.100,00
4. Note Book	38	774.180.150,00
5. Tablet PC	8	199.134.000,00
6. Personal Komputer lainnya	10	177.000.000,00
7. Komputer Unit Lainnya	2	33.966.000,00
8. Hard Disk	14	27.491.616,00
9. Scanner (Peralatan Mini Komputer)	12	84.970.000,00
10. Printer (Peralatan Personal Komputer)	140	491.846.875,00
11. Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	47.884.000,00
12. Peralatan Personal Komputer lainnya	9	16.051.000,00
13. Server	6	819.761.000,00
Alat Keselamatan Kerja	17	1.087.287.860,00
1. Tenda	10	845.966.000,00
2. Closed Circuit Television (CCTV)	1	194.667.360,00
3. Air Conditioning (AC)	6	46.654.500,00
Peralatan Olahraga	12	40.900.000,00
1. Treadmill	1	21.000.000,00
2. Peralatan Olahraga lainnya (dst)	11	19.900.000,00
Alat Angkutan	126	19.805.264.816,71
1. Sedan	4	2.289.252.430,50
2. Jeep	23	8.527.063.411,00

3.	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	20	4.966.014.239,00
4.	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	3	533.963.000,00
5.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	916.272.001,00
6.	kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	3	702.203.842,00
7.	Truck + Attachment	2	393.720.300,00
8.	Pick Up	2	456.765.512,50
9.	Sepeda Motor	58	826.477.280,71
10	Gerobak Tarik	2	97.075.000,00
.			
11	Sepeda	7	96.457.800,00
.			
Alat Bengkel dan Alat Ukur		1	9.860.000,00
1.	Global Positioning System	1	9.860.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga		2.573	18.933.716.175,00
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	3	10.860.000,00
2	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	1	2.000.000,00
3	Mesin Absen (Time Recorder)	4	20.516.000,00
4	Mesin Fotocopy Folio	4	429.069.000,00
5	Lemari Besi/Metal	31	123.622.500,00
6	Lemari Kayu	9	215.430.200,00
7	Rak Besi	2	20.550.000,00
8	Rak Kayu	1	99.869.000,00
9	Filing Cabinet Besi	65	189.309.000,00
10	Brandkas	6	127.850.000,00
11	Lemari Kaca	5	27.923.000,00
12	Lemari Makan	1	10.000.000,00
13	Papan Visual/Papan Nama	2	3.000.000,00
14	Mesin Absensi	1	74.599.720,00
15	White Board Electronic	1	30.855.000,00
16	LCD Projector/Infocus	1	18.800.000,00
17	Alat Kantor Lainnya	69	712.240.750,00
18	Meja Kerja Besi/Metal	1	5.994.000,00
19	Meja Kerja Kayu	58	309.219.750,00
20	Kursi Besi/Metal	273	215.972.000,00
21	Meja Rapat	36	343.930.700,00
22	Meja Resepsionis	2	64.558.500,00
23	Meja Tambahan	17	66.050.000,00
24	Meja Bundar	64	194.827.000,00
25	Meja 1/2 Biro	58	173.950.000,00
26	Kasur/Spring Bed	49	1.199.358.600,00
27	Meja Makan Besi	12	189.592.900,00

28	Meja Makan Kayu	1	49.225.000,00
29	Kursi Rapat	431	403.175.150,00
30	Kursi Tamu	9	107.775.000,00
31	Kursi Putar	22	166.573.400,00
32	Kursi Biasa	3	398.403.000,00
33	Kursi Lipat	4	467.531.200,00
34	Pot Bunga	10	22.200.000,00
35	Rak Sepatu (Almunium)	4	7.815.000,00
36	Sofa	23	963.929.905,00
37	Meja Rias	1	4.840.000,00
38	Meubeleur lainnya	222	1.275.725.140,00
39	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	6	20.895.000,00
40	Mesin Cuci	13	262.895.000,00
41	Lemari Es	9	68.450.200,00
42	A.C. Window	10	62.960.000,00
43	A.C. Split	23	164.980.000,00
44	Kipas Angin	2	10.000.000,00
45	Up Right Chiller/Frezzer	1	5.000.000,00
46	Alat Pendingin lainnya	2	25.000.000,00
47	Kompas Gas (Alat Dapur)	3	25.588.100,00
48	Rice Cooker (Alat Dapur)	78	982.910.850,00
49	Oven Listrik	3	6.920.000,00
50	Rice Warmer	20	287.740.000,00
51	Kitchen Set	5	437.364.550,00
52	Tabung Gas	6	4.461.600,00
53	Alat Pemanggang Roti/Sate	5	3.420.000,00
54	Rak Piring Alumunium	2	1.700.000,00
55	Alat Penyimpan Beras	7	6.206.000,00
56	Blender	6	7.148.070,00
57	Mixer	1	2.400.000,00
58	Presto Cooker	1	4.839.000,00
59	Alat Dapur lainnya	225	323.137.290,00
60	Televisi	44	942.463.000,00
61	Loudspeaker	7	61.870.000,00
62	Sound System	9	1.948.511.600,00
63	Karaoke	3	108.084.000,00
64	Wireless	5	22.500.000,00
65	Microphone	5	7.500.000,00
66	Microphone Floor Stand	10	5.000.000,00
67	Camera Video	13	276.450.600,00
68	Lambang Garuda Pancasila	2	5.250.000,00
69	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4	2.500.000,00
70	Pataka	7	9.940.000,00
71	Seterika	3	2.700.000,00
72	Tangga Aluminium	24	28.431.400,00

73	Dispenser	21	30.745.000,00
74	Mimbar/Podium	4	29.705.000,00
75	Coffee Maker	1	4.530.000,00
76	Karpet	9	18.000.000,00
77	Vertikal Blind	3	6.745.000,00
78	Gordyin/Kray	88	1.511.447.458,00
79	Alat Pemanas Ruangan	1	50.000.000,00
80	Lampu	6	166.445.200,00
81	Alat Rumah Tangga Lain-lain	325	955.185.642,00
82	Meja Kerja Bupati	3	32.930.800,00
83	Meja Kerja Wakil Bupati	1	4.200.000,00
84	Meja Kerja Pejabat Eselon II	6	99.800.000,00
85	Meja Kerja Pejabat Eselon III	15	99.800.000,00
86	Meja Rapat Wakil Bupati	1	14.945.000,00
87	Meja Tamu Biasa	1	3.200.000,00
88	Kursi Kerja Bupati	3	18.700.000,00
89	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	10.000.000,00
90	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	3	12.535.000,00
91	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10	982.445.400,00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		77	2.345.166.550,00
1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	13.000.000,00
2	Chairman/Audio Conference	2	20.000.000,00
3	peralatan studio audio lainnya (dst)	6	343.592.800,00
4	Camera Electronic	12	282.965.700,00
5	Video Monitor	2	620.000.000,00
6	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	4	184.693.000,00
7	Layar Film/Projector	5	290.288.000,00
8	Camera Digital	1	9.956.250,00
9	Alat Studio Video Lainnya	6	37.010.000,00
10	GPS Receiver	3	46.500.000,00
11	Telephone (PABX)	1	89.147.500,00
12	Handy Talky (HT)	10	49.450.000,00
13	Facsimile	4	47.920.000,00
14	Telepon Digital	4	27.198.300,00
15	Alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	149.985.000,00
16	Alat komunikasi radio vhf lainnya (dst)	1	93.500.000,00
17	Alat komunikasi sosial lainnya (dst)	10	39.960.000,00

Alat Laboratorium	13	260.082.500,00
1 Personal Computer	13	260.082.500,00
Jumlah Peralatan dan Mesin	3.182	47.771.229.842,71

2.4. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba sesuai dengan Indikator Kinerja Utama pada Renstra periode 2021-2026 rata-rata mencapai target yang telah ditentukan dengan tren menunjukkan berbagai peningkatan pada 4 (empat) tahun terakhir. Namun, masih terdapat capaian kinerja beberapa indikator yang dirasa belum optimal dikarenakan terdapatnya penyesuaian ketersediaan anggaran daerah. Adapun pencapaian kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.1

Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Nilai SAKIP Kabupaten	>50/C C	48,95/C	>60/B	53,85/A	>65/B	55,42/CC	>70/B B	60,04/B
2.	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2,88	2,88	3,00	2,88	3,40	2,60	3,41	2,62
3.	Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang terlayani	100	n/a	100	n/a	100	n/a	100	n/a
4.	Indeks Reformasi Hukum	n/a	n/a	n/a	46,76	n/a	53,10	n/a	63,00
5.	Terlaksananya Pengajuan Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang Tepat dan Akurat	100	n/a	100	n/a	100	n/a	100	93,83
6.	Rumusan Kebijakan Perekonomian yang dimanfaatkan menjadi Kebijakan	100	55,56	100	88,89	100	88,89	100	90,91
7.	Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100
8.	Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	100	n/a	100	n/a	100	n/a	100	100

9.	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	>50/C C	n/a	>60/B	n/a	>65/B	65,90/B	>80/B B	70,50/BB
10.	Realisasi Penyediaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Pelaksanaan Penataan Organisasi menuju Organisasi yang Efektif dan Efisien	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100
12.	Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Pelayanan Tamu Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
13.	Persentase rumusan kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	81,75	100	157,75	100	94,58	100	100,01
14.	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian pembangunan	100	73,33	100	67,58	100	80,95	100	104,17
15.	Capaian kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	65,38	100	66,98	100	76,17

Pencapaian kinerja pelayanan ini didukung dengan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Toba pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toba dengan capaian realisasi keuangan pada tahun 2021-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	38.789.397.347	38.526.464.084	46.230.332.125	51.792.238.867	29.947.332.387	34.549.777.777	44.316.054.096	48.842.543.344	77,20	89,68	95,86	94,30	10,12%	17,71%
BELANJA OPERASI	34.614.776.193	36.340.766.407	44.153.891.160	48.800.452.286	26.613.582.637	32.605.916.076	42.364.100.945	46.184.540.256	76,89	89,72	95,95	94,64	12,13%	20,17%
Belanja Pegawai	12.867.795.963	11.858.097.907	11.614.043.062	13.585.416.600	10.432.309.316	10.789.249.022	11.519.074.111	12.788.368.562	81,07	90,99	99,18	94,13	1,83%	7,02%
Belanja Barang & Jasa	19.696.980.230	22.222.668.500	29.254.848.098	30.900.035.686	14.301.273.321	19.606.667.054	27.615.026.834	29.266.171.694	72,61	88,23	94,39	94,71	16,19%	26,96%
Belanja Hibah	2.050.000.000	2.255.000.000	3.275.000.000	4.305.000.000	1.880.000.000	2.210.000.000	3.230.000.000	4.130.000.000	91,71	98,00	98,63	95,93	28,06%	30,00%
Belanja Bantuan Sosial	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BELANJA MODAL	4.174.621.154	2.185.697.677	2.076.440.965	2.991.786.581	3.333.749.750	1.943.861.701	1.951.953.151	2.658.003.088	79,86	88,94	94,00	88,84	-10,51%	-7,27%
Belanja Peralatan & Mesin	4.174.621.154	2.081.745.677	2.076.440.965	2.554.014.846	3.333.749.750	1.840.409.701	1.951.953.151	2.224.553.088	79,86	88,41	94,00	87,10	-15,11%	-12,62%
Belanja Gedung dan Bangunan	0	103.952.000	0	415.571.735	0	103.452.000	0	411.250.000	0,00	99,52	0,00	98,96	0,00%	0,00%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0	22.200.000	0	0	0	22.200.000	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%

Ditinjau dari tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai koordinator perumusan sekaligus monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tentu berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Beberapa pelayanan strategis Sekretariat Daerah diantaranya:

1. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD);
2. Mengoordinasikan penyusunan RAPBD dan PAPBD;
3. Mengoordinasikan penyusunan regulasi daerah (Perda dan Perkada);
4. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Mengoordinasikan ketersediaan bahan kebutuhan dasar masyarakat;
6. Mengoordinasikan pemenuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Mengoordinasikan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

2.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Toba yaitu Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Toba, dan masyarakat toba. Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Setdakab Toba juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Pusat Statistik, dan pihak-pihak lainnya.

2.6. Kerja Sama Perangkat Daerah dengan Mitra dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Toba mengoordinasikan kerja sama dengan mitra strategis yang terdiri dari:

1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba, mengenai penanganan hukum secara bersama antara Pemerintah Kabupaten Toba dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan Tata Usaha Negara di dalam maupun di luar pengadilan;
2. Advokat Rikardo Hutapea, SH., mengenai pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum atas masalah hukum yang dihadapi oleh pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Toba.

2.7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Toba, maka permasalahan pokok yang masih memerlukan perhatian khusus adalah sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian dan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
2. Pengkoordinasian dan monitoring regulasi daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan penganggaran dan pengamanan aset daerah;
4. Optimalisasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara serta pemberdayaan potensi daerah dan kearifan lokal;
5. Optimalisasi pengkoordinasian dan penyusunan

kebijakan penyelenggaraan pembangunan, perekonomian daerah serta kesejahteraan sosial.

2.8. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Toba dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.8.1
Isu-Isu Strategis di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Toba

Tugas dan Fungsi	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah			Isu Strategis Sekretariat Daerah
	Global	Nasional	Regional	
Tugas: Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan sebagai salah satu isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDG's.	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Sistem Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	Peningkatan tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, dan Penguatan Transparansi Pemerintahan	1. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pelayanan publik dan penataan perangkat daerah.
Fungsi: a. Memimpin dan mengoordinasikan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten; b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas para Asisten Sekretaris Daerah;				2. Peningkatan koordinasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan.
				3. Peningkatan koordinasi pembentukan regulasi daerah. 4. Peningkatan koordinasi penataan pemerintahan, kewilayahan, dan otonomi.
				5. Peningkatan koordinasi dan kerja sama 6. Pendayagunaan sarana dan

c. Mengoordinasikan penyusunan APBD; d. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah; e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah; f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; h. Melaksanakan pembinaan administrasi ASN; i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.				prasarana serta sumber daya manusia aparatur 7. Peningkatan koordinasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah; 8. Peningkatan koordinasi pengendalian perekonomian daerah. 9. Peningkatan koordinasi pelayanan protokoler dan komunikasi pimpinan. 10. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan. 11. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Toba

Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah harus mampu mengantisipasi dinamika di tengah masyarakat, pun kemajuan sistem informasi dan teknologi dengan menciptakan pola organisasi yang efektif. Kondisi tersebut dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sebagai perangkat daerah yang melaksanakan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah perlu menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan sejalan dengan berbagai tahapan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Toba.

Maka dari itu, berdasarkan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dengan Visi **“Toba Mantap 2029: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya”**. Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Maju Daerahnya bermakna: bahwa Kabupaten Toba menjadi daerah yang dapat sejajar dan bersaing dengan daerah lainnya melalui perwujudan pembangunan yang memberi hasil konkrit dan bermanfaat bagi masyarakat; tersedia infrastruktur yang berkualitas secara merata; sumber daya manusia yang semakin berkualitas; serta terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Sejahtera Rakyatnya bermakna: masyarakat menikmati kualitas hidup yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya pendapatan, menurunnya angka kemiskinan serta hasil pembangunan dapat dirasakan lebih optimal secara merata.

Berkelanjutan Pembangunannya bermakna: pembangunan daerah yang berfokus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat harus tetap memperhatikan kesejahteraan generasi di masa mendatang.

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah yang ditetapkan mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD periode 2025-2029, antara lain:

MISI 4	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih sebagai Pelayan (<i>Parhobas</i>) Rakyat.
ISU STRATEGIS 4	:	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
TUJUAN KE 4.1	:	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas
SASARAN 4.1.1	:	1. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kinerja pemerintah daerah 2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas
STRATEGI 1	:	Penentuan Tahapan Pembangunan untuk Mewujudkan Toba Mantap.
STRATEGI 3	:	Penentuan program prioritas untuk mewujudkan optimalisasi anggaran dalam upaya mencapai Toba Mantap.
KEBIJAKAN	:	1. Penguatan kapasitas aparatur daerah baik dari sisi kuantitas yang tepat guna, kualitas kinerja dan profesionalisme; 2. Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas; 3. Identifikasi obyek serta pihak-pihak yang berpotensi untuk dilakukan kerja sama dalam mendukung pembangunan daerah; 4. Meningkatkan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang terpadu, transparan dan akuntabel.
PROGRAM PRIORITAS	:	1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KAB TOBA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten											
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	64,97	67,00	70,00	73,00	76,00	79,00	82,00	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kinerja pemerintah daerah	Hasil Evaluasi SAKIP (Nilai)	60,04	63,50	67,10	70,80	74,50	78,10	82,25	
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	64,97	67,00	70,00	73,00	76,00	79,00	82,00	

3.2 Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

VISI: TOBA MANTAP 2029 “Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya”				
MISI IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Sebagai Pelayan (<i>Parhobas</i>) Rakyat				
TUJUAN RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kinerja pemerintah daerah	1. Penyediaan SOP akuntabilitas kinerja	Program Fungsi Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota
			2. Penyusunan rencana kinerja	Program Fungsi Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota
			3. Pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja	Program Fungsi Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota
			4. Penyusunan pelaporan kinerja	Program Fungsi Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota
			5. Pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Program Fungsi Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota
			6. Terlaksananya fasilitasi pelayanan public dan tata laksana	Program Fungsi Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	1. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Program pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
			2. Pelaksanaan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Program pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat

			3. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Program pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
			4. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan Otonomi Daerah	Program pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
			5. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah	Program pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
			6. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perekonomian	Program Pembangunan Dan Perekonomian
			7. Pelaksanaan evaluasi kebijakan bidang perekonomian	Program Pembangunan Dan Perekonomian
			8. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah	Program Pembangunan Dan Perekonomian
			9. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Program Pembangunan Dan Perekonomian
			10. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Program Pembangunan Dan Perekonomian
			11. Pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Program Pembangunan Dan Perekonomian

3.3 Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Perlunya arah kebijakan dalam mencapai tujuan yang merupakan pedoman atau panduan strategis yang disusun oleh suatu lembaga atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan. Tujuan Sekretariat Daerah yaitu **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas** dimana sasaran untuk mencapai tujuan tersebut terdiri dari:

1. Meningkatnya koordinasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
2. Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan
3. Meningkatnya koordinasi kebijakan bidang pemerintahan
4. Meningkatnya koordinasi kebijakan bidang perekonomian
5. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah
6. Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa
7. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kinerja pemerintah daerah

Sasaran ini menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Alasan penting arah kebijakan adalah fokus dan konsistensi, memastikan semua program dan kegiatan yang dijalankan tetap sejalan dengan tujuan jangka panjang organisasi atau pemerintah. Selanjutnya perbaikan kinerja menjadi acuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Penggunaan dan sumber daya efektif yang bisa membantu memprioritaskan isu-isu yang paling mendesak sehingga alokasi sumber daya dapat lebih efisien untuk sinergi dan koordinasi yang menciptakan sinergi antar instansi dan antar sektor, memastikan semua pihak bergerak ke arah yang sama.

Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba yang akan dicapai melalui 3 (tiga) program, diantaranya:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Kinerja: Capaian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat yaitu: Dinas Sosil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPMDPPA, Dinas PPKB, Satpol PP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - b. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Yang Dihasilkan dengan Indikator Kinerja: Persentase produk hukum yang dihasilkan melalui fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.
 - c. Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dengan Indikator Kinerja: Nilai LPPD yang dilaksanakan melalui koordinasi pelaksanaan Otonomi Daerah.
2. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya koordinasi kebijakan bidang perekonomian dengan Indikator Kinerja: Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah yang berkaitan dengan bidang perekonomian yaitu: Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perizinan, Penanaman Modal, dan Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
 - b. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah dengan Indikator Kinerja: Capaian sasaran strategis daerah yang dilaksanakan melalui koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah serta mengevaluasi program dan kegiatan yang strategis untuk mendukung percepatan perwujudan Toba Mantap 2029.

- c. Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa dengan Indikator Kinerja: Tingkat Kematangan UKPBJ yang dilaksanakan melalui pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan pembinaan serta advokasi pengadaan barang dan jasa.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran: Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kinerja pemerintah daerah dengan Indikator Kinerja: Hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan melalui penataan organisasi dan peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- a. Penataan organisasi dengan Indikator Kinerja: Persentase Instansi Pemerintah dengan skor SAKIP B dilaksanakan melalui pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - b. Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja: Evaluasi Internal AKIP yang dilaksanakan melalui penyediaan SOP akuntabilitas kinerja, penyusunan rencana kinerja, pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja, dan penyusunan pelaporan kinerja.

Sekaitan dengan sasaran Meningkatnya koordinasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan dimana pembentukan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) merupakan arah kebijakan yang sejalan dengan amanat pengembangan kabupaten melalui misi ketiga “Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah”

Dengan sumber daya alam yang sangat banyak dan berlimpah sehingga kabupaten Toba berpotensi menjadi kabupaten dengan pendapatan daerah yang baik. Oleh sebab itu Kabupaten Toba akan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah serta dapat membuka

lapangan kerja bagi Masyarakat dan program ini menjadi salah satu target dari Pemerintahan Kabupaten Toba. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu unit usaha daerah yang disebut dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tujuan:

1. Mengembangkan perekonomian daerah dan mengoptimalkan potensi daerah;
2. Menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan publik;
3. Berupaya meraih laba untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan;
4. Membuka Lapangan Kerja yang baru bagi Masyarakat.

Adapun BUMD yang direncanakan untuk dibentuk Kabupaten Toba terdiri dari:

- 1) Bidang sektor pertanian, BUMD pertanian sangat dibutuhkan karena potensi pertanian di daerah ini sangat bagus dan pertanian merupakan sumber penghasilan utama Masyarakat, hal ini didukung dengan luas Panen Padi sekitar 17,687 Haktar dan Jagung sekitar 10,022 Haktar. Namun tingkat kesejahteraan Masyarakat masih di bawah rata-rata dan kondisi ini terjadi akibat kurangnya Modal awal petani sehingga petani mengandalkan para agen untuk memberikan modal awal dengan perjanjian hasil panen akan diberikan kepada agen. Hal ini menjadi permasalahan yang sulit dituntaskan di Kabupaten Toba dimana harga jual hasil pertanian hanya ditentukan oleh Agen. Untuk memutuskan permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Toba akan mendirikan Badan Usaha yang dapat menampung hasil dari para petani dengan harga yang sesuai dan tidak merugikan para petani Toba.”.
- 2) Bidang Pertambangan Material Pasir, Pembentukan BUMD bidang pertambangan material pasir merupakan salah satu badan usaha yang menguntungkan bagi daerah karena Sedimen Pasir tersebut telah di keruk oleh Perusahaan Umum Jasa Tirta 1 dan ditempatkan di beberapa Spoil Bank yang telah di tentukan oleh PT. Inalum, Persero, Bidang udaha ini merupakan

bentuk Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Toba dengan PT. Inalum. Karena sesuai aturan yang berlaku bahwa Perusahaan tersebut tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan hasil pengerukan sedimen pasir sepanjang Sungai Asahan dan sedimen tersebut merupakan Limbah dari hasil Sungai Asahan. Kebutuhan sedimen pasir di Kab. Toba sangat tinggi dan sering di impor dari Kabupaten tetangga. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu di bentuk suatu BUMD di bidang pengelolaan sedimen pasir disamping dapat memenuhi kebutuhan dapat juga mengurangi dampak lingkungan seperti Banjir karena pengerukan sedimen pasir merupakan Normalisasi aliran Sungai.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH	KET.
1	2	3	4	5
1.	1. Pengoordinasian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten. 2. Pelaksanaan pembinaan administrasi ASN.	1. Penguatan kapasitas aparatur daerah baik dari sisi kuantitas yang tepat guna, kualitas kinerja dan profesionalisme.	1. Peningkatan capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2. Peningkatan capaian Indikator SPM. 3. Peningkatan kematangan dan efisiensi Organisasi.	
2.	3. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah. 1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas para Asisten Sekretaris Daerah.	2. Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.	4. Mewujudkan reregulasi dan deregulasi berbagai peraturan berdasarkan hasil reviu Badan Kebijakan Hukum dan Hak Azasi Manusia. 2. Mewujudkan kualitas layanan kebijakan sosial kemasyarakatan. 3. Penerapan Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Procurement. 4. Peningkatan Kegiatan Perekonomian Daerah melalui Pembentukan BUMD dan Faslitasi Pengembangan Ekonomi masyarakat dengan manfaat Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (CSR). 5. Peningkatan Manajemen dan penatausahaan Aset Sekretariat Daerah.	

3.	5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah.	6. Identifikasi obyek serta pihak-pihak yang berpotensi untuk dilakukan kerja sama dalam mendukung pembangunan daerah.	9. Peningkatan kualitas Implementasi Kerjasama Daerah.	
4.	6. Pengoordinasian penyusunan APBD. 7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. 8. Pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.	7. Meningkatkan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang terpadu, transparan dan akuntabel.	10. Peningkatan Sistem Pengawasan Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 8. Peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah. 9. Peningkatan Citra Positif (<i>punctuality</i>) KDH/WKDH.	

Disamping itu, dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 maka langkah selanjutnya adalah Penahapan Pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Toba. Penahapan Renstra Setdakab Toba disajikan pada tabel berikut:

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penyiapan landasan pembangunan menuju Toba Mantap	Peningkatan landasan pembangunan	Akselerasi pembangunan	Pemantapan capaian prioritas pembangunan	Perwujudan Toba Mantap sebagai landasan menuju Toba Unggul, Maju dan Berkelanjutan
Peningkatan koordinasi dan perumusan kebijakan atas intensifikasi pariwisata, pertanian, pusat pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan, layanan infrastruktur dasar publik dan potensi pendapatan daerah.	Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan kebijakan pengelolaan potensi daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan publik, dan pemerataan pelayanan dasar.	Evaluasi capaian pembangunan serta akselerasi koordinasi dan kebijakan dalam percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan layanan dasar dan kualitas pelayanan publik.	Optimalisasi koordinasi dan kebijakan peningkatan kualitas infrastruktur, layanan dasar serta pemantapan kualitas pelayanan publik.	

3.4. Lokus

Lokus Rencana Strategi (Renstra) merujuk pada cakupan wilayah geografis atau area prioritas yang menjadi focus pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan . Sekretariat Daerah Kabupaten Toba tidak memiliki lokus wilayah khusus karena bertugas mengkoordinasikan seluruh wilayah pemerintahan daerah secara menyeluruh dan terintegrasi. Keberhasilan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba di ukur berdasarkan kualitas koordinasi antar perangkat daerah, bukan pencapaian di lokasi tertentu

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan sebelumnya pada Bab III Renstra ini, maka perlu dituangkan rumusan program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran maupun program yang mendukung secara tidak langsung pencapaian tujuan dan sasaran.

Program yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program bersifat teknis sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap bagian. Sedangkan program yang mendukung secara tidak langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program bersifat penyelenggaraan rutin perkantoran, seperti halnya Program Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Untuk mengukur kinerja program maupun kegiatan, diperlukan indikator kinerja yang harus memenuhi unsur **SMART** (*Specific, Measureable, Achievable, Relevant, and Time Bond*). Dalam hal ini, terdapat perbedaan di antara kedua indikator kinerja dimaksud, yakni indikator kinerja program bersifat *outcome*, sedangkan indikator kinerja kegiatan bersifat *output*.

Secara terperinci, perencanaan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Toba ditampilkan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1
PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TOBA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					36.040.084.000,00		38.610.074.000,00		37.298.324.000,00		38.989.895.000,00		55.908.849.000,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					32.305.084.000,00		34.875.074.000,00		33.563.324.000,00		34.649.895.000,00		50.863.849.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	70,50	73,80	75,90	32.305.084.000,00	77,50	34.875.074.000,00	78,90	33.563.324.000,00	80,00	34.649.895.000,00	81,00	50.863.849.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah		
	Persentase kinerja pelayanan kedinasan Kepala Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah		
	Realisasi Penyediaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.500.000.000,00		4.000.000.000,00	
Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Produk Hukum Yang Dihasilkan	Capaian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (%)	-	80	81	3.000.000.000,00	82	3.000.000.000,00	83	3.000.000.000,00	84	3.500.000.000,00	85	4.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

	Nilai E-LPPD (Nilai)	2,94	2,97	3,00		3,10		3,20		3,30		3,41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					735.000.000,00		735.000.000,00		735.000.000,00		840.000.000,00		1.045.000.000,00	
Meningkatnya koordinasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian (%)	-	80	81	735.000.000,00	82	735.000.000,00	83	735.000.000,00	84	840.000.000,00	85	1.045.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Capaian Sasaran Strategis Daerah (%)	-	80-85	81-86		82-87		83-89		84-90		85-90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	3	4	5		6		7		8		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					36.040.084.000,00		38.610.074.000,00		37.298.324.000,00		38.989.895.000,00		55.908.849.000,00	

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TOBA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				36.040.084.000,00		38.610.074.000,00		37.298.324.000,00		38.989.895.000,00		55.908.849.000,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				32.305.084.000,00		34.875.074.000,00		33.563.324.000,00		34.649.895.000,00		50.863.849.000,00		
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	100	100	32.305.084.000,00	100	34.875.074.000,00	100	33.563.324.000,00	100	34.649.895.000,00	100	50.863.849.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten	
	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	70,50	75,90		77,50		78,90		80,00		81,00			
	Realisasi Penyediaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase kinerja pelayanan kedinasan Kepala Daerah (%)	100	100		100		100		100		100			
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				177.662.000,00		190.736.000,00		183.295.000,00		189.049.000,00		302.549.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	177.662.000,00	4	190.736.000,00	4	183.295.000,00	4	189.049.000,00	5	302.549.000,00		

	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	22	22		22		23		22		22			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				75.951.000,00		81.540.000,00		78.359.000,00		80.819.000,00		129.341.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		4	4	75.951.000,00	4	81.540.000,00	4	78.359.000,00	4	80.819.000,00	5	129.341.000,00		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				75.496.000,00		81.052.000,00		77.890.000,00		80.335.000,00		128.566.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		22	22	75.496.000,00	22	81.052.000,00	23	77.890.000,00	22	80.335.000,00	22	128.566.000,00		
4.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				26.215.000,00		28.144.000,00		27.046.000,00		27.895.000,00		44.642.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	2	26.215.000,00	2	28.144.000,00	2	27.046.000,00	2	27.895.000,00	2	44.642.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.335.991.000,00		14.317.519.000,00		13.759.135.000,00		14.208.834.000,00		17.265.371.000,00		
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	96	124	13.335.991.000,00	124	14.317.519.000,00	124	13.759.135.000,00	124	14.208.834.000,00	124	17.265.371.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	150		150		150		150		150			
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.307.154.000,00		14.286.560.000,00		13.729.384.000,00		14.160.486.000,00		17.187.997.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	96	124	13.307.154.000,00	124	14.286.560.000,00	124	13.729.384.000,00	124	14.160.486.000,00	124	17.187.997.000,00		
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				28.837.000,00		30.959.000,00		29.751.000,00		48.348.000,00		77.374.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	150	28.837.000,00	150	30.959.000,00	150	29.751.000,00	150	48.348.000,00	150	77.374.000,00		
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				65.938.000,00		70.789.000,00		68.028.000,00		71.331.000,00		138.429.000,00		
Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	65.938.000,00	4	70.789.000,00	4	68.028.000,00	4	71.331.000,00	4	138.429.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
4.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				48.027.000,00		51.561.000,00		49.550.000,00		51.105.000,00		81.787.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	100	100	48.027.000,00	100	51.561.000,00	100	49.550.000,00	100	51.105.000,00	100	81.787.000,00		
4.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				9.505.000,00		10.204.000,00		9.806.000,00		10.113.000,00		28.321.000,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	9.505.000,00	1	10.204.000,00	1	9.806.000,00	1	10.113.000,00	1	28.321.000,00		
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8.406.000,00		9.024.000,00		8.672.000,00		10.113.000,00		28.321.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	8.406.000,00	4	9.024.000,00	4	8.672.000,00	4	10.113.000,00	4	28.321.000,00		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.002.449.000,00		6.646.801.000,00		6.386.207.000,00		6.582.830.000,00		12.554.138.000,00		
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	6.002.449.000,00	4	6.646.801.000,00	4	6.386.207.000,00	4	6.582.830.000,00	4	12.554.138.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8	8		10		10		10		15			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
BIDANG URUSAN / PROGRAM /			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN

OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				95.653.000,00		102.693.000,00		98.687.000,00		101.785.000,00		162.895.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	95.653.000,00	4	102.693.000,00	4	98.687.000,00	4	101.785.000,00	4	162.895.000,00		
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				114.406.000,00		122.826.000,00		118.035.000,00		121.741.000,00		194.833.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	114.406.000,00	4	122.826.000,00	4	118.035.000,00	4	121.741.000,00	4	194.833.000,00		
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				534.768.000,00		574.126.000,00		551.735.000,00		569.059.000,00		910.718.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8	8	534.768.000,00	10	574.126.000,00	10	551.735.000,00	10	569.059.000,00	15	910.718.000,00		

4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				59.646.000,00		64.035.000,00		61.537.000,00		63.469.000,00		101.574.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	59.646.000,00	2	64.035.000,00	2	61.537.000,00	2	63.469.000,00	2	101.574.000,00		
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				99.617.000,00		106.948.000,00		102.777.000,00		106.004.000,00		169.647.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	99.617.000,00	3	106.948.000,00	3	102.777.000,00	3	106.004.000,00	3	169.647.000,00		
4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				2.087.872.000,0		2.144.115.000,0		2.059.129.000,0		2.119.884.000,0		4.411.668.000,0		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	2.087.872.000,0	12	2.144.115.000,0	12	2.059.129.000,0	12	2.119.884.000,0	12	4.411.668.000,0		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.010.487.000,0		3.532.058.000,0		3.394.307.000,0		3.500.888.000,0		6.602.803.000,0		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8	3.010.487.000,0	8	3.532.058.000,0	8	3.394.307.000,0	8	3.500.888.000,0	8	6.602.803.000,0		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.262.528.000,0		2.429.049.000,0		2.334.315.000,0		2.407.612.000,0		3.853.128.000,0		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	30	2.262.528.000,0	30	2.429.049.000,0	30	2.334.315.000,0	30	2.407.612.000,0	30	3.853.128.000,0		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	34		2		2		2		6			
BIDANG URUSAN / PROGRAM /				TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN

OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.040.097.000,0 0		1.116.648.000,0 0		1.073.098.000,0 0		1.106.793.000,0 0		1.771.305.000,0 0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	34	1.040.097.000,0 0	2	1.116.648.000,0 0	2	1.073.098.000,0 0	2	1.106.793.000,0 0	6	1.771.305.000,0 0		
4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.222.431.000,0 0		1.312.401.000,0 0		1.261.217.000,0 0		1.300.819.000,0 0		2.081.823.000,0 0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	30	1.222.431.000,0 0	30	1.312.401.000,0 0	30	1.261.217.000,0 0	30	1.300.819.000,0 0	30	2.081.823.000,0 0		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.064.798.000,0 0		3.270.155.000,0 0		3.091.692.000,0 0		3.188.769.000,0 0		5.317.375.000,0 0		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	3.064.798.000,0 0	4	3.270.155.000,0 0	4	3.091.692.000,0 0	4	3.188.769.000,0 0	4	5.317.375.000,0 0		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			

4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11.535.000,00		15.383.000,00		14.783.000,00		15.247.000,00		24.401.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	11.535.000,00	4	15.383.000,00	4	14.783.000,00	4	15.247.000,00	4	24.401.000,00		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				248.676.000,00		266.978.000,00		256.565.000,00		264.621.000,00		423.497.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	248.676.000,00	4	266.978.000,00	4	256.565.000,00	4	264.621.000,00	4	423.497.000,00		
4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.538.724.000,00		1.651.974.000,00		1.587.547.000,00		1.637.395.000,00		3.326.124.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	1.538.724.000,00	4	1.651.974.000,00	4	1.587.547.000,00	4	1.637.395.000,00	4	3.326.124.000,00		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.265.863.000,00		1.335.820.000,00		1.232.797.000,00		1.271.506.000,00		1.543.353.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.265.863.000,00	12	1.335.820.000,00	12	1.232.797.000,00	12	1.271.506.000,00	12	1.543.353.000,00		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.439.397.000,00		3.792.534.000,00		3.644.623.000,00		3.759.062.000,00		6.015.036.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	3.439.397.000,00	6	3.792.534.000,00	6	3.644.623.000,00	6	3.759.062.000,00	6	6.015.036.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	43	43		44		44		44		50			

	dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)													
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	7		7		7		7		7			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	11		11		11		12		15			
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				903.233.000,00		969.710.000,00		931.891.000,00		961.152.000,00		1.538.222.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	11	903.233.000,00	11	969.710.000,00	11	931.891.000,00	12	961.152.000,00	15	1.538.222.000,00		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.110.337.000,00		1.292.057.000,00		1.241.666.000,00		1.280.654.000,00		2.048.607.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	43	43	1.110.337.000,00	44	1.292.057.000,00	44	1.241.666.000,00	44	1.280.654.000,00	50	2.048.607.000,00		

Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)													
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.271.124.000,0 0		1.364.678.000,0 0		1.311.455.000,0 0		1.352.634.000,0 0		2.164.747.000,0 0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	7	1.271.124.000,0 0	7	1.364.678.000,0 0	7	1.311.455.000,0 0	7	1.352.634.000,0 0	7	2.164.747.000,0 0		
4.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				154.703.000,00		166.089.000,00		159.611.000,00		164.622.000,00		263.460.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	154.703.000,00	6	166.089.000,00	6	159.611.000,00	6	164.622.000,00	6	263.460.000,00		
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				978.064.000,00		992.605.000,00		984.332.000,00		990.732.000,00		1.295.277.000,0 0		
Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	978.064.000,00	2	992.605.000,00	2	984.332.000,00	2	990.732.000,00	2	1.295.277.000,0 0		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	2		2		2		2		2			

	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				230.484.000,00		230.484.000,00		230.484.000,00		230.484.000,00		279.761.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	230.484.000,00	2	230.484.000,00	2	230.484.000,00	2	230.484.000,00	2	279.761.000,00		
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				197.580.000,00		212.121.000,00		203.848.000,00		210.248.000,00		336.478.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2	2	197.580.000,00	2	212.121.000,00	2	203.848.000,00	2	210.248.000,00	2	336.478.000,00		
4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	60.000.000,00		
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional				510.000.000,00		510.000.000,00		510.000.000,00		510.000.000,00		619.038.000,00		

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	510.000.000,00	2	510.000.000,00	2	510.000.000,00	2	510.000.000,00	2	619.038.000,00		
4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				1.801.170.000,00		1.801.170.000,00		1.801.170.000,00		1.801.170.000,00		1.801.170.000,00		
Terfasilitasinya Kerumahtanggaan KDH/WKDH	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12	1.801.170.000,00	12	1.801.170.000,00	12	1.801.170.000,00	12	1.801.170.000,00	12	1.801.170.000,00		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				1.080.702.000,00		1.080.702.000,00		1.080.702.000,00		1.080.702.000,00		1.080.702.000,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12	1.080.702.000,00	12	1.080.702.000,00	12	1.080.702.000,00	12	1.080.702.000,00	12	1.080.702.000,00		
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				720.468.000,00		720.468.000,00		720.468.000,00		720.468.000,00		720.468.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12	720.468.000,00	12	720.468.000,00	12	720.468.000,00	12	720.468.000,00	12	720.468.000,00		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				496.864.000,00		633.431.000,00		608.725.000,00		727.837.000,00		1.164.822.000,00		
Meningkatnya penataan organisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	496.864.000,00	1	633.431.000,00	1	608.725.000,00	1	727.837.000,00	1	1.164.822.000,00		
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			

	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1	1				1				1			
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				224.090.000,00		240.583.000,00		231.200.000,00		238.459.000,00		381.628.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	3	3	224.090.000,00	3	240.583.000,00	3	231.200.000,00	3	238.459.000,00	3	381.628.000,00		
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				38.494.000,00		41.327.000,00		39.715.000,00		40.962.000,00		65.554.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2	2	38.494.000,00	2	41.327.000,00	2	39.715.000,00	2	40.962.000,00	2	65.554.000,00		
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				143.648.000,00		254.220.000,00		244.305.000,00		351.976.000,00		563.300.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	2	143.648.000,00	2	254.220.000,00	2	244.305.000,00	2	351.976.000,00	2	563.300.000,00		
4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				33.966.000,00		36.465.000,00		35.042.000,00		36.142.000,00		57.841.000,00		

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1	1	33.966.000,00	1	36.465.000,00	1	35.042.000,00	1	36.142.000,00	1	57.841.000,00		
4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				56.666.000,00		60.836.000,00		58.463.000,00		60.298.000,00		96.499.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	56.666.000,00	1	60.836.000,00	1	58.463.000,00	1	60.298.000,00	1	96.499.000,00		
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				680.223.000,00		730.285.000,00		701.802.000,00		722.669.000,00		1.156.554.000,00		
Terlaksananya Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	120	120	680.223.000,00	120	730.285.000,00	120	701.802.000,00	120	722.669.000,00	120	1.156.554.000,00		
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	120	120		120		120		120		120			
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitas Keprotokolan				260.720.000,00		279.908.000,00		268.991.000,00		277.437.000,00		444.008.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	120	120	260.720.000,00	120	279.908.000,00	120	268.991.000,00	120	277.437.000,00	120	444.008.000,00		
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan				180.184.000,00		193.445.000,00		185.900.000,00		191.737.000,00		306.854.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	120	120	180.184.000,00	120	193.445.000,00	120	185.900.000,00	120	191.737.000,00	120	306.854.000,00		
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				239.319.000,00		256.932.000,00		246.911.000,00		253.495.000,00		405.692.000,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4	4	239.319.000,00	4	256.932.000,00	4	246.911.000,00	4	253.495.000,00	4	405.692.000,00		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN				3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.500.000.000,00		4.000.000.000,00		

KESEJAHTERAAN RAKYAT														
Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Produk Hukum Yang Dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.500.000.000,00	100	4.000.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten	
	Nilai E-LPPD (Nilai)	2,94	3,00		3,10		3,20		3,30		3,41			
	Capaian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (%)	-	81		82		83		84		85			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				353.748.000,00		353.748.000,00		353.748.000,00		412.680.000,00		464.263.000,00		
Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1	1	353.748.000,00	1	353.748.000,00	1	353.748.000,00	1	412.680.000,00	1	464.263.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan				60.154.000,00		60.154.000,00		60.154.000,00		70.175.000,00		78.946.000,00		
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1	1	60.154.000,00	1	60.154.000,00	1	60.154.000,00	1	70.175.000,00	1	78.946.000,00		
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				78.627.000,00		78.627.000,00		78.627.000,00		91.726.000,00		103.191.000,00		

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1	1	78.627.000,00	1	78.627.000,00	1	78.627.000,00	1	91.726.000,00	1	103.191.000,00		
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah				214.967.000,00		214.967.000,00		214.967.000,00		250.779.000,00		282.126.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4	4	214.967.000,00	4	214.967.000,00	4	214.967.000,00	4	250.779.000,00	4	282.126.000,00		
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				2.154.903.000,00		2.154.903.000,00		2.154.903.000,00		2.514.115.000,00		2.830.884.000,00		
Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	0	1	2.154.903.000,00	1	2.154.903.000,00	1	2.154.903.000,00	1	2.514.115.000,00	1	2.830.884.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	1	1		1		1		1		1			

	Penduduk dan KB (Dokumen)													
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				355.661.000,00		355.661.000,00		355.661.000,00		414.914.000,00		466.778.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	2	2	355.661.000,00	2	355.661.000,00	2	355.661.000,00	2	414.914.000,00	2	466.778.000,00		
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				1.792.685.000,00		1.792.685.000,00		1.792.685.000,00		2.091.346.000,00		2.352.764.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	1	1	1.792.685.000,00	1	1.792.685.000,00	1	1.792.685.000,00	1	2.091.346.000,00	1	2.352.764.000,00		

4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				6.557.000,00		6.557.000,00		6.557.000,00		7.855.000,00		11.342.000,00		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	0	1	6.557.000,00	1	6.557.000,00	1	6.557.000,00	1	7.855.000,00	1	11.342.000,00		
4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum				342.999.000,00		342.999.000,00		342.999.000,00		400.141.000,00		510.157.000,00		
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Yang Dihasilkan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	100	100	342.999.000,00	100	342.999.000,00	100	342.999.000,00	120	400.141.000,00	150	510.157.000,00		
	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	100	100		100		100		120		150			
	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	7	7		7		7		7		7			
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah				38.099.000,00		38.099.000,00		38.099.000,00		44.446.000,00		80.001.000,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	100	100	38.099.000,00	100	38.099.000,00	100	38.099.000,00	120	44.446.000,00	150	80.001.000,00		
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitas Bantuan Hukum				244.823.000,00		244.823.000,00		244.823.000,00		285.610.000,00		321.311.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	7	7	244.823.000,00	7	244.823.000,00	7	244.823.000,00	7	285.610.000,00	7	321.311.000,00		
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan				60.077.000,00		60.077.000,00		60.077.000,00		70.085.000,00		108.845.000,00		

Pengelolaan Informasi Hukum														
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	100	100	60.077.000,00	100	60.077.000,00	100	60.077.000,00	120	70.085.000,00	150	108.845.000,00		
4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah				148.350.000,00		148.350.000,00		148.350.000,00		173.064.000,00		194.696.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	16	15	148.350.000,00	15	148.350.000,00	15	148.350.000,00	15	173.064.000,00	15	194.696.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	1	1				1		1					
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				103.055.000,00		103.055.000,00		103.055.000,00		120.223.000,00		135.250.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	16	15	103.055.000,00	15	103.055.000,00	15	103.055.000,00	15	120.223.000,00	15	135.250.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				45.295.000,00		45.295.000,00		45.295.000,00		52.841.000,00		59.446.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	1	1	45.295.000,00	1	45.295.000,00	1	45.295.000,00	1	52.841.000,00	1	59.446.000,00		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				735.000.000,00		735.000.000,00		735.000.000,00		840.000.000,00		1.045.000.000,00		
Meningkatnya koordinasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	3	5	735.000.000,00	6	735.000.000,00	7	735.000.000,00	8	840.000.000,00	9	1.045.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten	
	Capaian Sasaran Strategis Daerah (%)	-	81-86		82-87		83-89		84-90		85-90			

	Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian (%)	-	81		82		83		84		85			
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				301.057.000,00		301.057.000,00		301.057.000,00		351.817.000,00		449.182.000,00		
Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	0	4	301.057.000,00	4	301.057.000,00	4	301.057.000,00	4	351.817.000,00	4	449.182.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	3	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				22.285.000,00		22.285.000,00		22.285.000,00		35.700.000,00		59.842.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1	2	22.285.000,00	2	22.285.000,00	2	22.285.000,00	2	35.700.000,00	2	59.842.000,00		
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				119.677.000,00		119.677.000,00		119.677.000,00		134.636.000,00		161.563.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	3	6	119.677.000,00	6	119.677.000,00	6	119.677.000,00	6	134.636.000,00	6	161.563.000,00		

4.01.03.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				116.530.000,00		116.530.000,00		116.530.000,00		131.096.000,00		157.315.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	1	1	116.530.000,00	1	116.530.000,00	1	116.530.000,00	1	131.096.000,00	1	157.315.000,00		
4.01.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)				42.565.000,00		42.565.000,00		42.565.000,00		50.385.000,00		70.462.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	0	4	42.565.000,00	4	42.565.000,00	4	42.565.000,00	4	50.385.000,00	4	70.462.000,00		
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				154.356.000,00		154.356.000,00		154.356.000,00		173.650.000,00		208.380.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	12	13	154.356.000,00	13	154.356.000,00	13	154.356.000,00	13	173.650.000,00	13	208.380.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				92.196.000,00		92.196.000,00		92.196.000,00		103.720.000,00		124.464.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program	1	1	92.196.000,00	1	92.196.000,00	1	92.196.000,00	1	103.720.000,00	1	124.464.000,00		

Evaluasi Program Pembangunan	Pembangunan (Laporan)													
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				62.160.000,00		62.160.000,00		62.160.000,00		69.930.000,00		83.916.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	12	13	62.160.000,00	13	62.160.000,00	13	62.160.000,00	13	69.930.000,00	13	83.916.000,00		
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				239.118.000,00		239.118.000,00		239.118.000,00		269.006.000,00		332.806.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	100	120	239.118.000,00	120	239.118.000,00	120	239.118.000,00	120	269.006.000,00	120	332.806.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	100	150		150		150		150		150			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	10	20		20		20		20		20			
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				124.572.000,00		124.572.000,00		124.572.000,00		140.143.000,00		168.171.000,00		
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	100	150	124.572.000,00	150	124.572.000,00	150	124.572.000,00	150	140.143.000,00	150	168.171.000,00		
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				101.731.000,00		101.731.000,00		101.731.000,00		114.447.000,00		137.336.000,00		
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	100	120	101.731.000,00	120	101.731.000,00	120	101.731.000,00	120	114.447.000,00	120	137.336.000,00		
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				12.815.000,00		12.815.000,00		12.815.000,00		14.416.000,00		27.299.000,00		

Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	10	20	12.815.000,00	20	12.815.000,00	20	12.815.000,00	20	14.416.000,00	20	27.299.000,00		
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				40.469.000,00		40.469.000,00		40.469.000,00		45.527.000,00		54.632.000,00		
Meningkatnya koordinasi kebijakan bidang perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	2	2	40.469.000,00	2	40.469.000,00	2	40.469.000,00	2	45.527.000,00	2	54.632.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				40.469.000,00		40.469.000,00		40.469.000,00		45.527.000,00		54.632.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	2	2	40.469.000,00	2	40.469.000,00	2	40.469.000,00	2	45.527.000,00	2	54.632.000,00		

TABEL 4.3

DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TOBA

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten				
1.	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
			4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
			4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
2.	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Produk Hukum Yang Dihasilkan	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja Utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama, dan menjadikan hal tersebut sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dengan merumuskan Indikator Kinerja Utama, instansi pemerintah dapat mengetahui performa kinerja organisasi selama periode tertentu. Selain itu, Indikator Kinerja Utama juga mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah di masa mendatang. Sehingga, perangkat daerah semakin berupaya untuk meraih tujuan, sasaran, dan rencana strategis yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan disusunnya IKU adalah untuk memperoleh ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan menjadi tolok ukur untuk meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah. Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dapat dirumuskan pada tabel 4.4 berikut:

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TOBA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten									
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,97	67,00	70,00	73,00	76,00	79,00	82,00	
3.	Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	60,04	63,50	67,10	70,80	74,50	78,10	82,25	

4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah

Sebagai bentuk komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Toba dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Toba, maka dirumuskan suatu indikator kinerja sasaran strategis untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yaitu Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah, yang dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini:

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
2.	Tingkat Kematangan UKPBJ	positif	Angka	3	4	5	6	7	8	9	

4.4. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sekretariat Daerah

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Toba yang mendukung langsung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, juga terdapat Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai indikator yang selaras dengan indikator kinerja pada level Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat, yang diuraikan pada table 4.6. sebagai berikut:

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	39,74	41	41	42	43	44	45	
2	Return on Asset (ROA) BUMD	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	
3	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	5,36	5,38	5,39	5,40	5,40	5,41	5,42	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,97	67,00	70,00	73,00	76,00	79,00	82,00	
2	Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	60,04	63,50	67,10	70,80	74,50	78,10	82,25	
3	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,43	3,46	3,49	3,52	3,55	3,58	3,61	
4	Persentase Capaian Aksi HAM	%	65,50	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Penilaian Integritas	Indeks	72,09	100	100	100	100	100	100	
6	Jumlah Kerjasama Daerah	Kerja Sama	0	0	1	2	2	2	3	
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	3	4	5	6	7	8	9	

BAB V

PENUTUP

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, maka Sekretariat Daerah berupaya mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Toba dengan optimal dan berhasil guna. Perencanaan strategis ini selain menjadi pedoman, juga sebagai stimulasi peningkatan produktivitas dan kinerja serta sebagai alat ukur akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah yang tentunya dapat lebih menajamkan arah gerak langkah Sekretariat Daerah, terutama dalam pengelolaan anggaran yang merupakan salah satu elemen pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan Visi **Toba Mantap 2029: “Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya”**.

Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai acuan dalam rumusan perencanaan strategis lima tahunan ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih proporsional, transparan, efektif dan efisien sesuai kebutuhan secara objektif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kesenjangan berkaitan dengan kondisi ideal yang diharapkan dapat diproyeksikan dengan kondisi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat, pun reformasi birokrasi secara esensial mendukung implementasi otonomi daerah dengan membuka ruang partisipasi masyarakat yang dilandasi oleh budaya daerah **“Tampakna Do Rantosna, Rim Ni Tahi Do Gogona”** disertai budaya kerja aparatur sebagai **Parhobas** yang profesional;
2. Rumusan kebijakan yang difasilitasi penyusunannya oleh Sekretariat Daerah memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat, aspek regulasi yang jelas, pasti dan adil serta dapat

dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergis antar unit kerja pemerintah daerah secara integratif, efektif dan efisien;

3. Tersedianya pedoman strategis akan kerangka kerja yang terstandardisasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan menyangkut kebijakan-kebijakan yang bersifat regulasi (*regulation*), pelayanan (*service*) dan pemberdayaan (*empowering*) dengan dukungan pelayanan administrasi pemerintahan yang baik;
4. Pelaksanaan kewenangan/urusan pemerintahan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diselenggarakan secara efektif dengan proses penataan organisasi pemerintahan yang lebih proporsional, dengan struktur sederhana namun kaya fungsi;
5. Kinerja aparatur pemerintah daerah mengarah pada profesionalitas diberbagai bidang, menunjukkan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja berorientasi pada hasil dan pencapaian tujuan pembangunan dapat lebih optimal dan inklusif.

Proyeksi tersebut, selain memberikan ukuran atas pencapaian tujuan yang telah diuraikan dalam penjelasan program, kegiatan dan sub kegiatan juga memberikan landasan pada penetapan kebijakan sebagai Standar Operasional Prosedur untuk meningkatkan efektivitas kinerja seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.

Melalui proses penilaian, evaluasi dan pelaporan kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai tolok ukur dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, niscaya Sekretariat Daerah terus mempersiapkan diri mengantisipasi dinamika dalam rentang waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan setiap potensi, peluang dan kendala yang ada ataupun mungkin timbul.

Dengan demikian, apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut menunjukkan perkembangan dan perubahan maka Rencana Strategis ini dapat dievaluasi kembali untuk diselaraskan dan disesuaikan sesuai kebutuhan dengan mengedepankan kepentingan umum.

Pada akhirnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 ini, diharapkan menjadi suatu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi pengimplementasian berbagai kebijakan strategis di lingkungan Sekretariat Daerah sehingga mampu memberikan daya dukung, baik dalam rangka mengakomodir kepentingan pelayanan terhadap masyarakat maupun perangkat daerah lainnya, dan yang terpenting dapat memberikan kontribusi bagi kesuksesan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Toba.

Balige, 19 September 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA**



AUGUS SITORUS